Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

bpkad KAB.NGANJUK HANDAL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2025



Bpkad Nganjuk bpkadkabnganjuk bpkadkabnganjuk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Penyusunan laporan ini sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk selama Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kita semua.

Nganjuk, 13 Februari 2026

Kepala BPKAD

Kabupaten Nganjuk,

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Struktur Organisasi 4
D. Permasalahan dan Isu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 14
E. Sistematika Penulisan 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 17
2.1 Rencana Strategis 17
2.2 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24
A. Capaian Kinerja Organisasi 25
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025 77
BAB IV PENUTUP 94

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil *(result oriented government).* SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya secara transparan dan terukur.

Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunannya, LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan siklus manajemen kinerja, setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025, instansi pemerintah menyusun LKjIP Tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan yang memuat pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, yang berisi ikhtisar capaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan dan dokumen penetapan kinerja.

Penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Nganjuk dimaksudkan untuk menyajikan informasi kinerja secara komprehensif dan objektif terkait tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal Tahun Anggaran 2025. LKjIP ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun fungsi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk melalui perbandingan antara hasil pengukuran kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
2. Sebagai bahan evaluasi dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran berikutnya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana telah diiubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan 2025;
21. Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 100.3.4.2/189/411.000/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C STRUKTUR ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk yang dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaiman telah di ubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun struktur organisasi BPKAD Kabupaten Nganjuk terdiri dari 5 (lima) unit kerja yaitu Sekretariat dan 4 (Empat) Bidang dengan susunan sebagai berikut:
Sekretariat, terdiri dari:

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
c. Unsur Pelaksana

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari

a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
b. Unsur Pelaksana

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari

a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
b. Unsur Pelaksana

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari

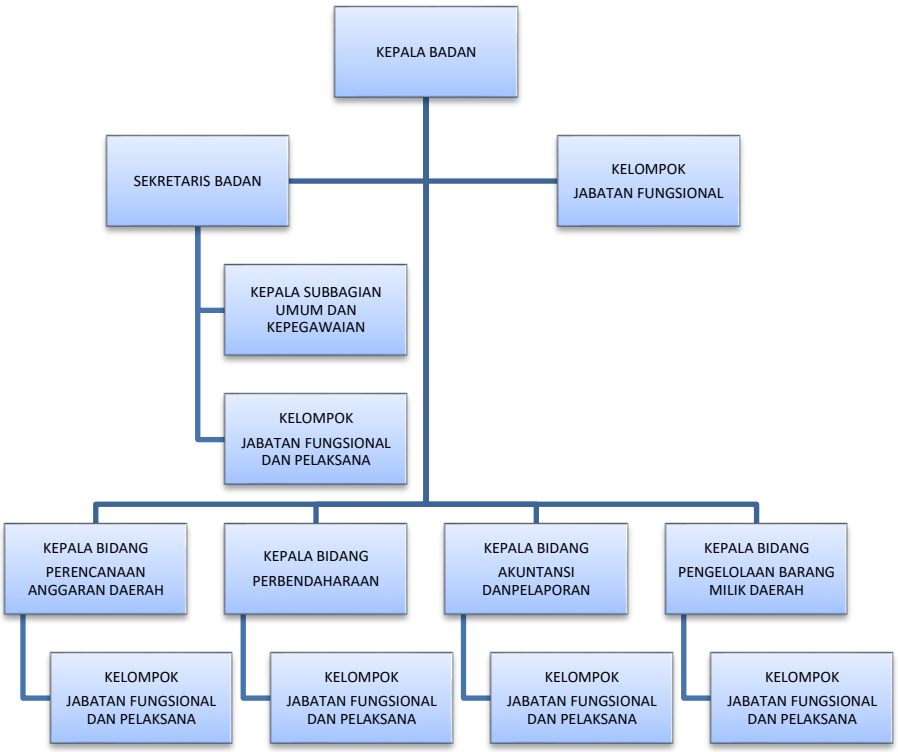
a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
b. Unsur Pelaksana

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari

a. Analis Kebijakan Publik Ahli Muda
b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
c. Unsur Pelaksana

Struktur Organisasi

Bagan organisasi BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:



Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

   Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaanan keuangan dan aset;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaanan keuangan dan aset;
d) Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Unit Kerja:

a) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretaris mempunyai fungsi :

(1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
(2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
(3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
(4) Pembinaan aparatur;
(5) Pengelolaan urusan kepegawaian;
(6) Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
(7) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
(8) Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
(9) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
(10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

(1) melaksanakan urusan persuratan;
(2) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
(3) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

(4) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
(5) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
(6) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
(7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasikan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

(1) Pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
(2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)/(DPPA SKPD dan PPKD;
(3) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
(4) Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
(5) Penyusunan regulasi bidang anggaran;
(6) Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan;
(7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugasnya.

c) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kebijakan bidang perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

(1) pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
(2) pengoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
(3) pengoordinasian pengelolaan dana transfer;
(4) pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana (SP2D);
(5) pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD dan penerbitan SKPP;
(6) pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
(7) pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
(8) pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
(9) pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
(10) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan; dan
(11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas nya.

d) Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis akuntansi dan pelaporan keuangan serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
(2) pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
(3) pengoordinasian kegiatan penyusunan racangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

(4) pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
(5) penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
(6) pelaksanaan proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
(7) pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
(8) penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
(9) penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
(10) penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
(11) pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
(12) pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
(13) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
(14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas nya.

e) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjalankan fungsi:

(1) pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
(2) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidangpengelolaan barang milik daerah;
(3) pengelolaan administrasi kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
(4) mengkoordinasi dan menyiapkan standar harga dan standar barang;

(5) penyusunan dan mengusulkan pengurus barang dan penyimpan barang perangkat daerah;
(6) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
(7) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah kepada pengelola barang;
(8) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
(9) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
(10) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
(11) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
(12) pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada bupati melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
(13) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
(14) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
(15) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;

(16) pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka menyusun laporan barang milik daerah;

(17) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan

(18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas nya.

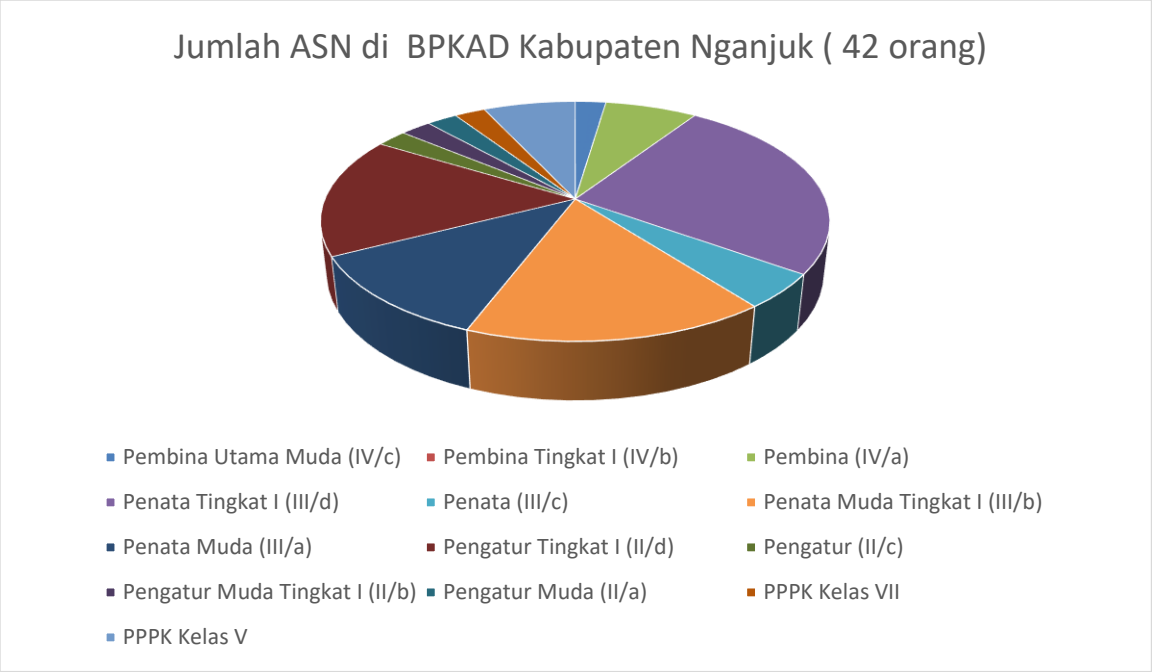
4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 42 ASN orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No	Golongan/Ruang	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-
3.	Pembina (IV/a)	2	1	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	4	7	11
5.	Penata (III/c)	2	-	2
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	6	7
7.	Penata Muda (III/a)	2	3	5
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	3	7
9.	Pengatur (II/c)	-	1	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
12.	PPPK Kelas VII	-	1	1
13.	PPPK Kelas V	2	1	3
	Jumlah	**19**	**23**	**42**

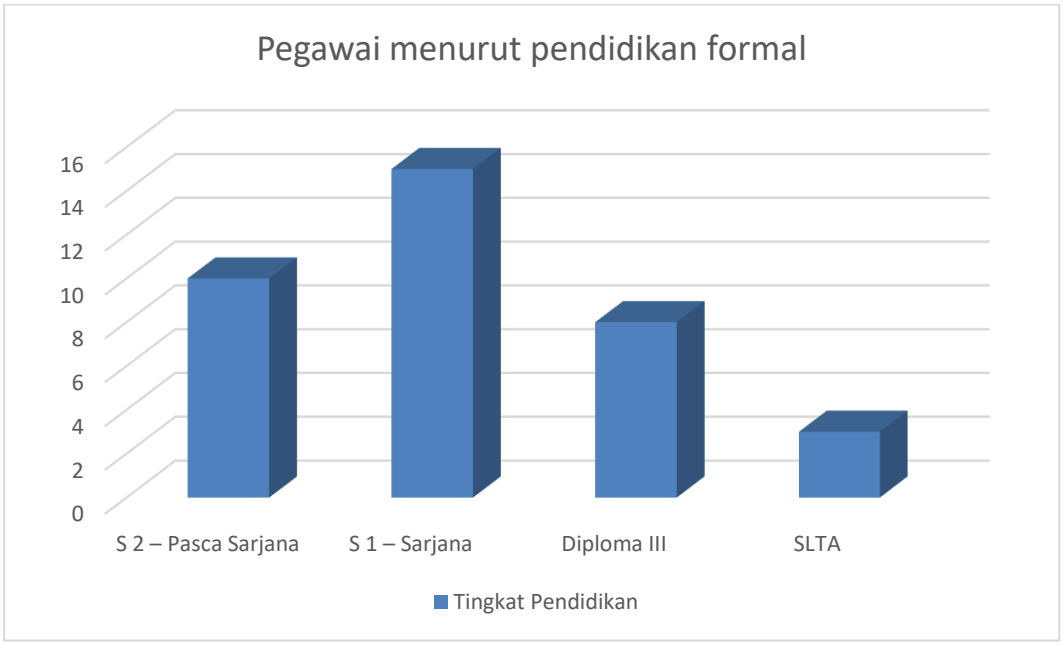
Sumber Data : DUK Akhir Desember 2025



b. Pegawai menurut pendidikan formal adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S 2 – Pasca Sarjana	10
2.	S 1 – Sarjana	15
3.	Diploma III	8
4.	SLTA	9
	Jumlah	**42**

Sumber Data : DUK Akhir Desember 2025

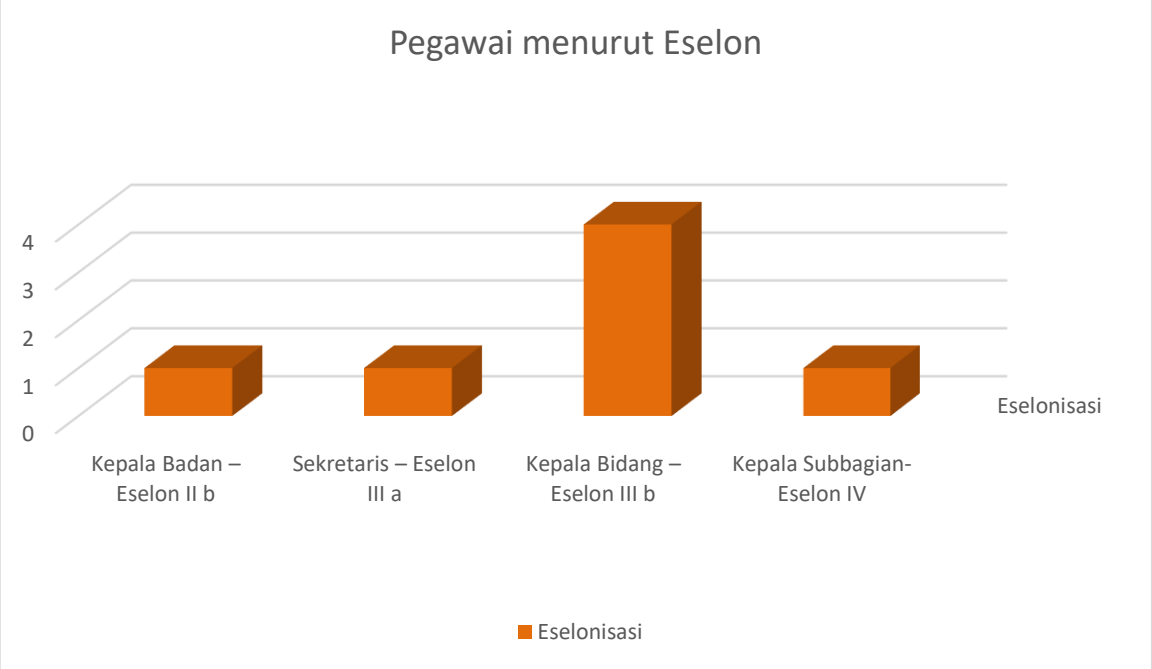


c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

No	Eselonisasi	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan – Eselon II b	1
2.	Sekretaris – Eselon III a	1
3.	Kepala Bidang – Eselon III b	4
4.	Kepala Subbagian-Eselon IV	1
	Jumlah	**7**

Sumber Data : DUK Akhir Desember 2025

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural adalah : 36 orang, dan jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional adalah : 6orang.



5. Sarana dan Prasarana

Dukungan sumber daya sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

a. Gedung dan Kantor

BPKAD menempati gedung dua lantai yang berada di Jalan Brantas, Babadan, Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

b. Alat-alat angkutan

Sarana kendaraan operasional yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Nganjuk menurut Buku Inventaris Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Pemakai	Jenis kendaraan		Jumlah
		Roda 4	Roda 2	
1.	Pejabat Eselon II	-	-	-
2.	Pejabat Eselon III	4	-	4
3.	Pejabat Eselon IV / Fungsional	-	12	12
4.	Operasional BPKAD	2	-	2
	Jumlah	**6**	**12**	**18**

c. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Selain gedung kantor dan kendaraan operasional yang mendukung, sarana dan prasarana lain yaitu peralatan dan perlengkapan kantor yang lengkap dan memadai juga sangat mendukung kelancaran tugas. Dari sebagian peralatan dan perlengkapan kantor yang menjadi tanggung jawab BPKAD sampai saat ini kondisinya relatif masih bagus.

D. PERMASALAHAN DAN ISU DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sesuai Renstra 2024 - 2026

a. Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah

- Belum optimalnya komitmen OPD dalam penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban uang persediaan yang dikelola sehingga penyerapan anggaran belum optimal;
- Pemahaman terhadap tupoksi masing-masing pengelola keuangan di SKPD masih kurang. Kondisi ini diperparah dengan ketentuan perundangan yang tumpang tindih terutama tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS;
- Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb);

b. Isu Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

- Penguatan kapasitas, komitmen serta sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset OPD ;

- Penyusunan dan implementasi standart pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Percepatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.

2. Sesuai Renstra 2025 – 2029

a. Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah

- Belum optimalnya komitmen OPD dalam penyusunan dokumen pengganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban uang persediaan yang dikelola sehingga penyerapan anggaran cukup rendah;
- Pemahaman terhadap tupoksi masing-masing pengelola keuangan di SKPD masih kurang. Kondisi ini dikarenakan ketentuan perundangan yang tumpang tindih terutama tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS dan BOP untuk swasta;
- Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb);
- Optimalisasi Pelayanan SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

b. Isu Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

- Penguatan kapasitas, komitmen serta sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset OPD;
- Penyusunan dan implementasi standart pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Percepatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang/gambaran umum, landasan hukum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasaran, permasalahan dan isu strategis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan sistematika penulisan;
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA, menguraikan tentang ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan senantiasa menjaga keterhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 atau disebut dengan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 serta penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daera (Renstra - PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1. Cascading Kinerja Berdasarkan RPD 2024-2026

No.	RPD 2024-2026	RENSTRA PD 2024-2026
1.	**Nganjuk Akuntabel** Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD	Tujuan: Meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD
	Sasaran 1:	Sasaran :

No.	RPD 2024-2026	RENSTRA PD 2024-2026
	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar

Tabel 2.2. Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

No.	RPJMD 2025-2029	RENSTRA PD 2025-2029
1.	Visi Daerah 2025-2029 : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat. Misi Daerah 2025-2029 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.	
	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (masuk tujuan IPKAD Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam dimensi nomor 6 yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator Sasaran Opini BPK Terhadap LKPD.

No.	RPJMD 2025-2029	RENSTRA PD 2025-2029
	atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD))	

Selanjutnya Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dapat dijelaskan dalam Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Berbasis RPD 2024-2026

No	Tujuan RPD	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal	Target		
			2023	2026			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Berbasis RPJMD 2025-2029

No	Tujuan RPJMD	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
			2024	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan laporan Keuangan Perangkat daerah	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
					Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	80	80	80	80	80	80

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come* disamping *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan intregitas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai tolok ukur kinerja dan dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Tanggal Perjanjian	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	2 Januari 2025	Perjanjian Kinerja Pelaksana Tugas Kepala BPKAD dengan Penjabat Bupati berdasarkan RPD 2024-2026

Untuk mencapai kinerja yang ditetapkan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun rencana aksi yang terbagi dalam program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM RUTIN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, terdiri dari 8 Kegiatan dan 31 Subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.352.297.095,00 berdasarkan APBD;

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, terdiri dari 4 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 435.686.152.830,00 berdasarkan APBD;
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, terdiri dari 1 Kegiatan dan 8 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.105.000.000,00 berdasarkan APBD.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Tanggal Perjanjian	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	23 September 2025	Amandemen Perjanjian Kinerja karena penyesuain dengan Rensta 2025-2029 (RPJMD 2025-2029)

Untuk mencapai kinerja yang ditetapkan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun rencana aksi yang terbagi dalam program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM RUTIN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, terdiri dari 8 Kegiatan dan 31 Subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.352.297.095,00 berdasarkan APBD;
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, terdiri dari 4 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 435.686.152.830,00 berdasarkan APBD;
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, terdiri dari 1 Kegiatan dan 8 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.105.000.000,00 berdasarkan APBD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya BPKAD Kabupaten Nganjuk perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja dinas selanjutnya. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Untuk melaksanakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja Tahun 2025, BPKAD Kabupaten Nganjuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang beririsan dengan dokumen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Nganjuk.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan nilai capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek interval nilai capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Hasil analisis Nilai capaian kinerja Kabupaten Nganjuk disajikan sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Tercapai
2.	80% ≤ 90%	Tercapai dengan catatan
3.	≤ 80%	Tidak tercapai

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

BPKAD Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai di tahun 2025. Dari tujuan dan sasaran tersebut semuanya dapat dicapai dengan hasil maksimal. Capaian tujuan dan sasaran Tahun 2025 dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator -indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan –Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2024-2026	WTP	WTP	100%	-
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2025-2029	WTP	WTP	100%	-

Sumber : **hasil audit oleh BPK untuk LKPD Tahun 2024**

Analisis terhadap pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. **Analisis Capaian Kinerja bersumber dari Renstra 2024-2026**

   Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah

   Capaiannya 100 % didasarkan atas telah diterbitkannya **hasil audit oleh BPK untuk LKPD Tahun 2024** dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana dituangkan dalamLaporan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

2. **Analisis Capaian Kinerja bersumber dari RENSTRA 2025-2029**

   Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

   Dalam Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 adalah untuk tujuan OPD di Renstra 2024-2026 berbeda dengan tujuan OPD di Renstra 2025-2029 tetapi untuk Indikator Kinerja Utama sama dan berkelanjutan sehingga Capaiannya sama 100 % yaitu hasil audit oleh BPK untuk LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana dituangkan dalam Laporan

Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 tanggal 23 Mei 2025

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 , 2023 , 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target kinerja				Realisasi Kinerja			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Tujuan : Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2018-2023	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP	-	-
1	Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2024-2026	-	-	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2025-2029	-	-	-	WTP	-	-	-	WTP

Analisis dari tabel diatas untuk tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya adalah Capaian kinerja tujuan berdasarkan sumber Renstra 2018-2023 , Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 memiliki sedikit perbedaan. Dan dari ketiga sumber dokumen perencanaan memiliki Indikator Kinerja Opini atas audit LKPD oleh BPK realisasinya menunjukan kinerja yang stabil dan sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat dengan pencapaian Opini dengan predikat WTP tahun 2025 dan tiga tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerjanya kategori **Tercapai**

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir tahun Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2024-2026	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2025-2029	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari tabel di atas Target Renstra dapat dicapai mengikuti tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan kinerja yang stabil dan terukur sebagaimana landasan yang telah dicantumkan dalam Renstra 2024 – 2026 dan Renstra 2025 –2029 dengan target akhir pada tahun 2030 yaitu Opini atas audit LKPD oleh BPK dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 3.1.3.2
Target kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra -Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

1	Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2024-2026	WTP	WTP	100%
3	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2025-2029	WTP	WTP	100%

Untuk mengukur tingkat kemajuan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, rumus yang dipergunakan adalah :

Tingkat Kemajuan = (Realisasi Kinerja 2025/Target pada akhir renstra) x 100%

Analisis dari tabel diatas adalah Tingkat kemajuan tujuan berdasarkan dokumen Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 adalah WTP dengan tingkat kemajuan sebesar 100 %. Dengan tingkat kemajuan dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah ≥ 91% **Tercapai**. Dengan kriteria **Tercapai** menjadi kemajuan ditahap akhir RENSTRA 2024-2026 yang mempedomani RPD 2024-2026 sebagai dokumen transisi, menjadi fondasi dan kemajuan awal dalam dokumen perencanaan RENSTRA 2025-2029 yang mempedomani dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Nganjuk. Sehingga untuk mempertahankan kinerja yang bagus maka perlu adanya perencanaan , pelaporan dan evaluasi yang berkualitas.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Regional (Jawa Timur)

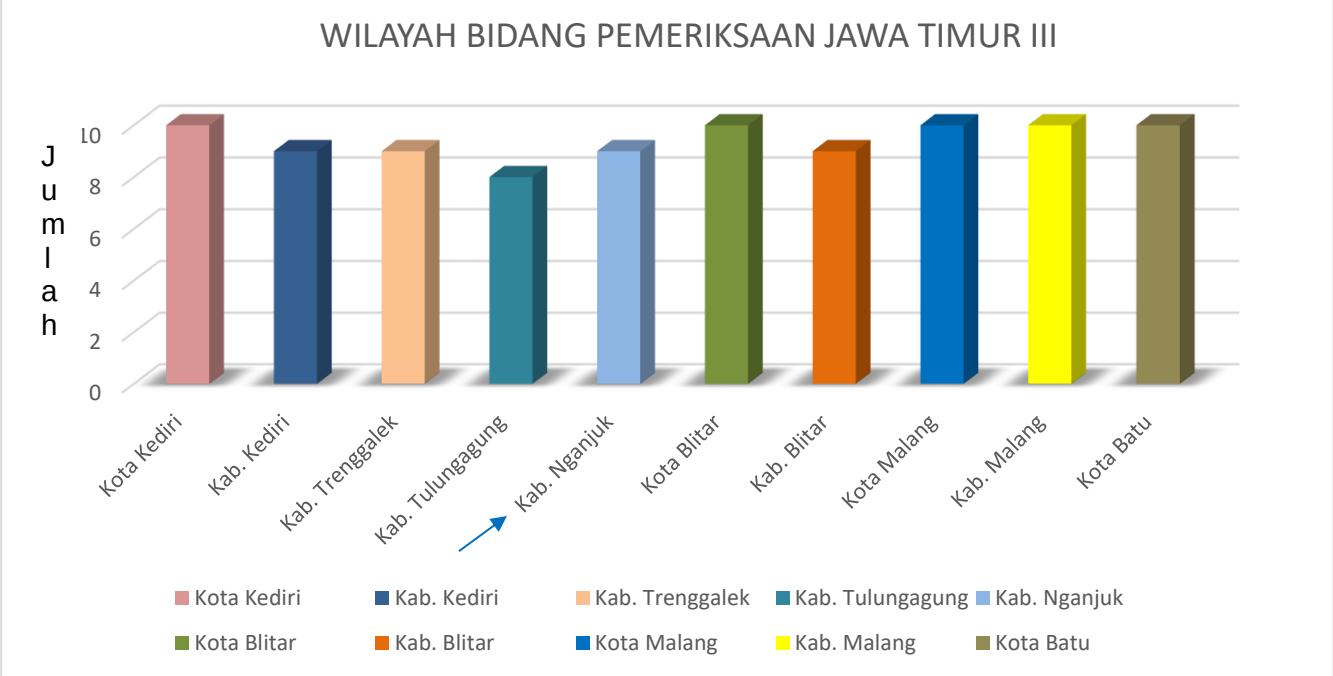
Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional
(berdasarkan RPD 2024-2026)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Provinsi	Realisasi BPKAD Nganjuk 2025	Posisi kinerja
1	***2***	***3***	***4***	***5***
Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	WTP	WTP	Setara

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dengan target perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **setara** apabila dibandingkan dengan Standar Regional. Dalam hal ini data yang dipakai sebagai pembanding adalah LkjIP Tahun 2024 Kabupaten Madiun, LkjIP Tahun 2024 Kabupaten Jombang dan LkjIP Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro.

Gambaran Capaian Kinerja berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan pemerintah daerah lainnya yang satu wilayah bidang pemeriksaan di BPK RI dari tahun 2015-2024 sebagai berikut :

Perbandingan Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Regional
(berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Regional	Realisasi Kinerja tahun 2024	Posisi kinerja
1	***2***	***3***	***4***	***5***
Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	WTP	WTP	Setara

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dengan target perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **setara** apabila dibandingkan dengan Standar Regional. Dalam hal ini data yang dipakai sebagai pembanding adalah LkjIP Tahun 2024 Kabupaten Madiun, LkjIP Tahun 2024 Kabupaten Jombang dan LkjIP Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro. Dan hasilnya setara BPKAD Kabupaten Nganjuk dan Pemerintah kabupaten / kota lainnya yang dipakai untuk pembanding.

.

A.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif solusi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Tujuan : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2024-2026	WTP	WTP	100 %	**Faktor pendukung :** • Laporan keuangan disusun dan disajikan berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku memastikan konsistensi dan relevansi informasi keuangan. • Perencanaan dan Penganggaran Berkualitas • Koordinasi dan Sinergi Antar OPD • Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan aset Terintegrasi • Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	-
3	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2025-2029	WTP	WTP	100 %	**Faktor pendukung :** • Laporan keuangan disusun dan disajikan berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku memastikan konsistensi dan relevansi informasi keuangan.	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif solusi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
							• Perencanaan dan Penganggaran berkualitas • Koordinasi dan Sinergi Antar OPD • Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan aset Terintegrasi • pemanfaatan inovasi • Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	

Analisis Capaian Realisasi Kinerja Tabel 3.1.5 di atas Capaian Kinerja Tujuan berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029. Dari dua dokumen tersebut memiliki Indikator Kinerja Opini atas LKPD oleh BPK, Capaian Kinerja yang diperoleh WTP sehingga menunjukan kinerja yang stabil dan sesuai target. Hal ini dapat dilihat dengan pencapaian Opini dengan perdikat WTP tahun 2025 dan tiga tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerjanya kategori **Tercapai.**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Nganjuk memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. BPKAD Kabupaten Nganjukmempunyai inovasi untuk menunjang capaian kinerja. Tujuan dari inovasi itu sendiri adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi tata kelola pemerintahan, dan daya saing daerah melalui pembaruan sistem, metode, atau teknologi dan Inovasi bertujuan mempercepat pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas. Inovasi yang dimiliki BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. SIM - DTH (Sistem Informasi Manajemen Daftar Transaksi Harian)

   Aplikasi SIM - DTH (Sistem Informasi Manajemen Daftar Transaksi Harian) adalah aplikasi berbasis web untuk pembuatan Daftar Transaksi Harian Keuangan dan Rekonsiliasi Transaksi Harian oleh Bendahara masing-masing OPD. Pembuatan transaksi yang sebelumnya manual dan dikumpulkan secara *papering* digantikan dengan sistem digital dan *paperless* sehingga lebih efektif, efisien dan tepat waktu. Manfaat dari penggunaan aplikasi adalah pelaporan ke Instansi Terkait yaitu KPPN lebih cepat dan menunjang dalam pencairan Bagi Hasil Pajak.

b. SIM –ASET(Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah)

   SIM-ASET adalah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu pencatatan aset daerah bagi masing-masing pengelola barang milik daerah. Manfaat dari penggunaan aplikasi adalah pengelola aset daerah dapat mengelola aset dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. DITATA TENG DPA(Tanda Tangan Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

   DITATA TENG DPA adalah aplikasi berbasis web untuk memudahkan validasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Manfaat dari aplikasi ini adalah pengajuan tanda tangan tidak lagi secara manual sehingga proses pengesahan DPA lebih efisien.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi sumber daya dilaksanakan untuk mengukur bagaiamana realisasi kinerja dapat dicapai dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada. Pengukuran tersebut dapat diilustrasikan dengan tabel berikut :

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Tujuan : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2024-2026	WTP (100%)	30,88 %	69.12
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2025-2029	WTP (100%)	96.76 %	3.24

Pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dihitung dengan rumus :

Tingkat Efisiensi = Capaian kinerja 2025 - % penyerapan anggaran 2025

Hasil analisis tabel diatas dengan menggunakan Tingkat Efisiensi

a. Tingkat efisensi sumber dokumen perencanaan RPD 2024-2026

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Nganjuk sebesar 100 % dan realisasi anggaran adalah sebesar 30,88 %. Sebagai catatan data realisasi anggaran adalah data berjalan yaitu data Triwulan III sehingga penggunaan sumber daya sebesar 30,88% dan tingkat efisiensi 69,12%. Hal ini terjadi karena pada Triwulan I dan II belum ada kegiatan yang menyerap anggaran tinggi khususnya di Bidang

Perbendaharaan. Kegiatan yang terserap tinggi berada pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu koordinasi dan verifikasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagai bahan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan diajukan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

b. Tingkat efisensi sumber dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Nganjuk sebesar 100 % dan realisasi anggaran adalah sebesar 96.76 % sehingga penggunaan sumber daya yang diefisiensi adalah sebesar 3.24%. Penggunaan anggaran yang terbesar adalah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kegiatan tersebut terdapat Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Subkegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Kegiatan lain yang menyerap anggaran besar adalah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Kegiatan Perencanaan Anggaran Daerah menjadi kegiatan berikutnya yang memerlukan sumber dana yang besar. Penyusunan anggaran mengalami beberapa kali perubahan karena harus menyesuaikan dengan dinamisasi politik yatu penetapan RPJMD oleh Kepala Daerah definitif. Perubahan-perubahan tersebut menyesuaikan dengan ritme perencanaan nasional dan strategi untuk pencapaian program unggulan yang ditetapkan.

A.7 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.1.7.1

Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Berdasarkan Renstra 2024-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Tujuan : **Meningkatkan tata kelola keuangan daerah**	**Opini BPK**	**Renstra 2024-2026**						
	Sasaran : **Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standart**	**Renstra 2024-2026**						
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	**Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**Nilai**	**81.1**	**75**	**91%**
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**85%**	**85%**	**100%**
				Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	dokumen	4	4	100%
				Koordinasi dan Penyusunandokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*	dokumen	1	1	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	*Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**85**	**85**	**100%**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*asn*	*46*	*43*	*96%*
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akkhir tahun SKPD*	*dokumen*	*1*	*1*	*100%*
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD*	*dokumen*	*12 dokumen*	*12 dokumen*	*100%*
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**50**	**50**	**100%**
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	*Laporan*	*1*	*1*	*100%*
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**57%**	**57%**	**100%**
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*	*orang*	*50*	*50*	*100%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-unfdangan*	*orang*	*70*	*70*	*100%*
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase fasilitas dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**%**	**65**	**57**	**87%**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan*	*paket*	*1*	*0*	*0%*
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	*laporan*	*10*	*6*	*60%*
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat*	*laporan*	*36*	*30*	*83%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					koordinasi dan konsultasi SKPD				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*	*dokumen*	*100*	*100*	*100%*
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah SKPD yang diadakan**	**%**	**80%**	**95%**	**118%**
				Pengadaan Mebel	*Jumlah unit mebel yang di sediakan*	*unit*	*10*	*8*	*80%*
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan*	*unit*	*10*	*11*	*110%*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**%**	**55%**	**55%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	*laporan*	*2*	*2*	*100%*
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan*	*laporan*	*8*	*8*	*100%*
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan*	*laporan*	*12*	*9*	*75%*
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah SKPD yang di pelihara**	**%**	**70%**	**70%**	**100%**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan*	unit	15	15	100%
				Pemeliharaan Mebel	*Jumlah mebeleur yang dipelihara*	unit	1	1	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara*	unit	8	8	80%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi*	unit	1	1	100%
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai standart**	**%**	**80%**	**88,94%**	**101%**
				Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**Persentase dokumen anggarang daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu**	**%**	**68 %**	**68 %**	**100%**
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun*	*dokumen*	*2*	*1*	*50%*
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*				
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah**	**%**	**55%**	**55%**	**100%**
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah*	*dokumen*	*4.572*	*4.572*	*100%*
				Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	*Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD*	*dokumen*	*192*	*192*	*100%*
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan adana transfer lainnya*	*dokumen*	51	51	100%
				Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan*	*dokumen*	1	1	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keunagan bank dan lembaga keuangan bukan bank*				
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait*	*dokumen*	449	449	100%
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan*	*dokumen*	*5*	*5*	*100%*
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**%**	**75 %**	**75%**	**100 %**
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban*	*dokumen*	*3*	*3*	*100%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran*	*laporan*	*3*	*3*	*100%*
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah*	*dokumen*	*1*	*1*	*50%*
				Pembinaan Akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota*	*orang*	*50*	*50*	*100%*
				Penunjang Urusan Kewenangan	**Persentase terlaksananya urusan**	**%**	**80 %**	**75 %**	**76 %**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Pengelolaan Keuangan Daerah	**kewenangan pengelolaan keuangan daerah**				
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan*	*laporan*	*6*	*5*	*83%*
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak*	*laporan*	*2*	*2*	*100%*
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota*	*laporan*	*2*	*-*	*0%*
				Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**%**	**50 %**	**10 %**	**20 %**
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota*	*orang*	*100*	*10*	*10%*
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah	Renstra 2024-2026	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**%**	**75 %**	**75 %**	**100%**
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase pengelolaan BMD sesuai standar**	**%**	**75 %**	**75 %**	**100 %**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target sd TW III	Realisasi sd TW III	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang disusun*	*dokumen*	*30*	*30*	*100%*
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan pengelolaan BMD*	*dokumen*	*40*	*40*	*100%*
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan penatausahaan*	*laporan*	*1*	*0*	*0%*
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) BMD*	*laporan*	*36*	*36*	*100%*
				Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil pengemanan BMD*	*laporan*	*3*	*3*	*100%*
				Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil pengamanan BMD*	*laporan*	*25*	*25*	*100%*
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan*	*dokumen*	*7*	*7*	*100%*

Dari Tabel 3.1.7diatas dapat diketahui pencapaian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   - Target : 75 %
   - Realisasi : 76 %
   - Capaian Kinerja : 101 %

- **Kriteria capaian kinerja** **: Tercapai**

2. Capaian Program Pengelolaan Keuangan
   - Target : 80%
   - Realisasi : 88,94%
   - Capaian Kinerja : 101%
   - **Kriteria capaian kinerja** **: Tercapai**
3. Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   - Target : 75 %
   - Realisasi : 75%
   - Capaian Kinerja : 100%
   - **Kriteria capaian kinerja** **: Tercapai**

Untuk capaian kinerja Tercapai dengan catatan karena data sampai triwulan III merupakan target akhir dari dokumen Renstra 2024-2026 dengan berpedoman pada dokumen RPD 2024-2026 Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.1.7.2

Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Tujuan : **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**Opini atas audit LKPD oleh BPK**	**Renstra 2025-2029**						
	Sasaran 1 : **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Renstra 2025-2029**						
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	**Nilai Akuntabilitas kinerja perangkat daerah (nilai)**	**Nilai**	**81.1**	**80,20**	**98.89**
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**%**	**100**	**100**	**100**
				Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	dokumen	5	5	100%
				Koordinasi dan Penyusunandokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	*Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**%**	**100**	**95**	**95**
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*asn*	*46*	*43*	*96%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akkhir tahun SKPD*	*dokumen*	*1*	*1*	*100%*
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD*	*dokumen*	*17*	*17*	*100%*
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase dokumenAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**%**	**100**	**100**	**100**
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	*Laporan*	*2*	*2*	*100%*
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**100**	**42**	**42**
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*	*orang*	*150*	*55*	*37%*
				Bimbingan Teknis Implementasi	*Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi*	*orang*	*150*	*70*	*50%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Peraturan Perundang-undangan	*peraturan perundang-unfdangan*				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase fasilitas dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**%**	**100**	**96.75**	**96.75**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan*	*dokumen*	*3*	*2*	*100%*
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	*laporan*	*10*	*8*	*80%*
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*laporan*	*36*	*34*	*94%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*	*dokumen*	*200*	*200*	*100%*
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan barang milik daerah SKPD yang terlaksana**	**%**	**100**	**145**	**145**
				Pengadaan Mebel	*Jumlah unit mebel yang di sediakan*	*unit*	*10*	*11*	*110%*
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan*	*unit*	*10*	*18*	*180%*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	*laporan*	*3*	*3*	*100%*
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan*	*laporan*	*12*	*12*	*100%*
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan*	*laporan*	*12*	*12*	*100%*
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan BMD pada SKPD yang dilaksanaakan**	**%**	**100**	**96.77**	**96.77**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di*	unit	19	18	95%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan*				
				Pemeliharaan Mebel	*Jumlah mebeleur yang dipelihara*	unit	1	1	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara*	unit	10	10	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi*	unit	1	1	100%
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)**	**%**	**100**	**100**	**100**
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	**%**	**30**	**37 %**	**123 %**
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	**%**	**40 %**	**32 %**	**80 %**
					Persentase Penurunan SILPA	**%**	**5**	**16.76**	**200**
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**%**	**80**	**106.72**	**133.4**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**Presentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu**	**%**	**100**	**90,90**	**90.90**
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*dokumen*	*5*	*4*	*80%*
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**%**	**100**	**102,78**	**102,78**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah*	*dokumen*	*9.000*	*9.277*	*103%*
				Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	*Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD*	*dokumen*	*208*	*208*	*100%*
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan adana transfer lainnya*	*dokumen*	92	92	100%
				Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keunagan bank dan lembaga keuangan bukan bank*	*dokumen*	1	1	100%
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait*	*dokumen*	650	650	100%
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	*Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan*	*dokumen*	*5*	*5*	*100%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan*				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah**	**%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban*	*dokumen*	*11*	*11*	*100%*
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran*	*laporan*	*4*	*4*	*100%*
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	*Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*				
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*
				Pembinaan Akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota*	*orang*	*150*	*150*	*100%*
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**%**	**80 %**	**80 %**	**100 %**
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan*	*laporan*	*6*	*6*	*100%*
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak*	*laporan*	*4*	*4*	*100%*
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota*	*laporan*	*2*	*2*	*100%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**%**	**100 %**	**20 %**	**20 %**
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota*	*orang*	*100*	*20*	*20%*
	Sasaran 2 : **Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah**	**Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah**	**Renstra 2025-2029**						
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**%**	**5**	**4,023**	**80,46**
					Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan	***%***	***100***	***100***	***100***
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase penambahan nilai aset tetap 5%**	**%**	**5**	**4,023**	**80,46**
				Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang disusun*	*dokumen*	*52*	*52*	*100%*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan pengelolaan BMD*	*dokumen*	*52*	*52*	*100%*
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan penatausahaan*	*laporan*	*1*	*1*	*100%*
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) BMD*	*laporan*	*52*	*52*	*100%*
				Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil pengemanan BMD*	*laporan*	*4*	*4*	*100%*
				Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil pengamanan BMD*	*laporan*	*30*	*30*	*100%*
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan*	*dokumen*	*26*	*26*	*100%*

Dari tabel 3.1.7.2 dapat diketahui pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   - Target : 81.1
   - Realisasi : 80.20
   - Capaian Kinerja : 98.9 %
   - Kriteria capaian kinerja : Tercapai

2. Capaian Program Pengelolaan Keuangan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a) Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

- Target indikator : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Capaian Kinerja : 100 %
- Kriteria capaian kinerja : Tercapai

b) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

- Target : 30 %

  Realisasi : 37 %

  Capaian Kinerja : 123 %

  Kriteria capaian kinerja : Tercapai

c) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

- Target : 40 %

  Realisasi : 32 %

  Capaian Kinerja : 80 %

  Kriteria capaian kinerja : Tercapai dgn catatan

d) Persentase Penurunan SILPA

- Target : 5 %

  Realisasi : 16.76 %

  Capaian Kinerja : 200 %

  Kriteria capaian kinerja : Tercapai

e) Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- Target : 80 %

Realisasi : 106.72 %

Capaian Kinerja : 133.4 %

Kriteria capaian kinerja : Tercapai

3. Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

- Target : 5 %

  Realisasi : 4.023 %

  Capaian Kinerja : 80.46 %

  Kriteria capaian kinerja :Tercapai dgn catatan

b) Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan

- Target : 100 %

  Realisasi : 100 %

  Capaian Kinerja : 100 %

  Kriteria capaian kinerja : Tercapai

Tabel 3.1.8

Tautan (Link) Dokumen Bukti Dukung (Evidence) Untuk Kinerja Pada Program Dan Kegiatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Tujuan : **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**Opini atas audit LKPD oleh BPK**	**Renstra 2025-2029**							
	Sasaran 1 : **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Renstra 2025-2029**							
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	**Nilai Akuntabilitas kinerja perangkat daerah (nilai)**	**Nilai**	**81.1**	**80,20**	**98.89**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PIagzAoSUI6vp18sM9F2cz667ucpQyZc**
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**%**	**100**	**100**	**100**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bXUApUpRiV9W3wtc5Ps05UXf1G0LnpGQ**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	dokumen	5	5	100%	
				Koordinasi dan Penyusunandokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	dokumen	1	1	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	dokumen	1	1	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	dokumen	1	1	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	*Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD*	dokumen	4	4	100%	
				Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*	dokumen	3	3	100%	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
					dokumen perubahan RKA-SKPD					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**%**	**100**	**95**	**95**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WheTbKkKr9KL8YKm0o2Sc2ARn4o0lz--**
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*asn*	*46*	*43*	*96%*	
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akkhir tahun SKPD*	*dokumen*	*1*	*1*	*100%*	
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD*	*dokumen*	*17*	*17*	*100%*	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase dokumenAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**%**	**100**	**100**	**100**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q2NGC4wY2GIyEZQ00csxlBc2g1CTlliO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	*Laporan*	*2*	*2*	*100%*	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**100**	**42**	**42**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1scE624chv3Jyn84TaXRQAbGsmo1kBn-K**
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*	*orang*	*150*	*55*	*37%*	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-unfdangan*	*orang*	*150*	*70*	*50%*	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase fasilitas dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**%**	**100**	**96.75**	**96.75**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zW1H4qEQyHQV-ZtOEq113uFEGyvquNbk**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan*	*paket*	*1*	*1*	*100%*	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan*	*dokumen*	*3*	*2*	*100%*	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	*laporan*	*10*	*8*	*80%*	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*laporan*	*36*	*34*	*94%*	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*	*dokumen*	*200*	*200*	*100%*	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan barang milik daerah SKPD yang terlaksana**	**%**	**100**	**145**	**145**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zoPCkFJFFwCOUbvnll1_u91ZJdwKuVMW**
				Pengadaan Mebel	*Jumlah unit mebel yang di sediakan*	*unit*	*10*	*11*	*110%*	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan*	*unit*	*10*	*18*	*180%*	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**	**100**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DdrC5ZQV4aFHkJ722ITEorfz0qYKmuGX**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	*laporan*	*3*	*3*	*100%*	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan*	*laporan*	*12*	*12*	*100%*	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan*	*laporan*	*12*	*12*	*100%*	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan BMD pada SKPD yang dilaksanaakan**	**%**	**100**	**96.77**	**96.77**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MiWfX8RhqZk2v0xCAGKmbnZH7PjaWLFu**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di*	unit	19	18	95%	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*bayarkan pajak dan perizinan*					
				Pemeliharaan Mebel	*Jumlah mebeleur yang dipelihara*	unit	1	1	100%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara*	unit	10	10	100%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi*	unit	1	1	100%	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)**	**%**	**100**	**100**	**100**	**https://drive.google.com/drive/folders/1pOUWufQVy0S1w5x0lchIgway6OzGRZRF**
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	**%**	**30**	**37 %**	**123 %**	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	**%**	**40 %**	**32 %**	**80 %**	
					Persentase Penurunan SILPA	**%**	**5**	**16.76**	**200**	
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**%**	**80**	**106.72**	**133.4**	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**Presentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu**	**%**	**100**	**90,90**	**90.90**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17w_8EyiuTwJVO1YcnMbc4_kPKEEkPMx6**
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*dokumen*	*5*	*4*	*80%*	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan**	**%**	**100**	**102,78**	**102,78**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
					perbendaharaan daerah					**o4UfkcjlPbM3xbUV6SrLVvsLz3_m5NX**
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah*	*dokumen*	*9.000*	*9.277*	*103%*	
				Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	*Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD*	*dokumen*	*208*	*208*	*100%*	
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan adana transfer lainnya*	*dokumen*	92	92	100%	
				Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keunagan bank dan lembaga keuangan bukan bank*	*dokumen*	1	1	100%	
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan*	*dokumen*	650	650	100%	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
					pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait					
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan*	*dokumen*	*5*	*5*	*100%*	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah**	**%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RBmBV5MI5gQrvLLAyx0M0X-CkDNUcynP**
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban*	*dokumen*	*11*	*11*	*100%*	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran*	*laporan*	*4*	*4*	*100%*	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah*	*dokumen*	*2*	*2*	*100%*	
				Pembinaan Akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota*	*orang*	*150*	*150*	*100%*	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**%**	**80 %**	**80 %**	**100 %**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12baNvj3QysTjx1wOzz7HQUuEZSUzh7**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
										OK
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan*	*laporan*	*6*	*6*	*100%*	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak*	*laporan*	*4*	*4*	*100%*	
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota*	*laporan*	*2*	*2*	*100%*	
				Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**%**	**100 %**	**20 %**	**20 %**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1t4OzdYpZPjCNEHpl-y7TW6HzsaQoGCa7**
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota*	*orang*	*100*	*20*	*20%*	
	Sasaran 2 : **Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah**	**Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah**	**Renstra 2025-2029**							

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**%**	**5**	**4,023**	**80,46**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nYpcCgjyolfUNKpNQMG4YvM5eYG6Gwn-**
					Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan	***%***	*100*	*100*	***100***	***https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nYpcCgjyolfUNKpNQMG4YvM5eYG6Gwn-***
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase penambahan nilai aset tetap 5%**	**%**	**5**	**4,023**	**80,46**	**https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m4dVojzBFYIAkOaMCw53rqQI9N4nwdls**
				Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang disusun*	*dokumen*	*52*	*52*	*100%*	
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan pengelolaan BMD*	*dokumen*	*52*	*52*	*100%*	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan penatausahaan*	*laporan*	*1*	*1*	*100%*	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) BMD*	*laporan*	*52*	*52*	*100%*	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanan	Uraian Prog/Keg./Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tautan File *(Link)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
				Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil pengemanan BMD*	*laporan*	*4*	*4*	*100%*	
				Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan hasil pengamanan BMD*	*laporan*	*30*	*30*	*100%*	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan*	*dokumen*	*26*	*26*	*100%*	

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Nganjuk, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 445.143.449.925,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 450.866.504.247,51 yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebelum perubahan anggaran

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**7.424.747.095,00**	**7.212.605.625,35**	**212.141.470**	**97,14%**
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	54.567.000	51.949.600	2.617.400	95,20%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.185.000	10.589.000	-2.404.000	129,37%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.639.000	5.082.000	2.557.000	66,53%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.639.000	5.873.850	1.765.150	76,89%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.457.000	4.630.750	826.250	84,86%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.457.000	4.365.000	1.092.000	79,99%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.276.000	12.970.000	-3.694.000	139,82%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.914.000	8.439.000	2.475.000	77,32%
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.419.046.661**	**5.439.805.554**	**-20.758.893**	**100,38%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.405.405.661	5.421.810.554	-16.404.893	100,30%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.639.000	6.646.000	993.000	87,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.002.000	11.349.000	-5.347.000	189,09%
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.831.000**	**9.839.000**	**992.000**	**90,84%**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.831.000	9.839.000	992.000	90,84%
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**200.801.950**	**144.854.901**	**55.947.049**	**72,14%**
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	33.300.000	0	33.300.000	0,00%
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.287.950	19.615.000	56.672.950	25,71%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.214.000	125.239.901	-34.025.901	137,30%
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**409.775.822**	**247.256.904**	**162.518.918**	**60,34%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.218.892	10.170.200	48.692	99,52%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.872.400	1.008.300	2.864.100	26,04%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.095.440,00	89.931.224	31.164.216	74,26%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.742.000	9.754.852	22.987.148	29,79%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	2.520.000	2.880.000	46,67%
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.354.240	5.109.458	9.244.782	35,60%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.264.000	84.741.000	102.523.000	45,25%
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.370.950	44.021.870	-17.650.920	166,93%
9	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	8457900	0	8.457.900	0,00%
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**313.710.773**	**296.440.725**	**17.270.048**	**94,49%**
1	Pengadaan Mebel	27.914.000	27.845.700	68.300	99,76%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285.796.773	268.595.025	17.201.748	93,98%
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**509.915.000**	**628.387.187**	**-118.472.187**	**123,23%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.365.000	3.974.000	391.000	91,04%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	197.522.979	42.477.021	82,30%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.550.000	426.890.208	-161.340.208	160,76%
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**506.098.000**	**401.064.754**	**105.033.246**	**79,25%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.824.000	115.936.344	43.887.656	72,54%
2	Pemeliharaan Mebel	10.788.500	1.412.500	9.376.000	13,09%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.810.050	71.050.150	36.759.900	65,90%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.676.000	205.672.760	22.003.240	90,34%
B.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**435.686.152.830,00**	**422.231.732.809**	**13.454.420.021**	**96,91%**
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.984.440.044	1.244.354.601	740.085.443	62,71%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	444.440.730	285.954.620	158.486.110	64,34%
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	454.999.866	290.014.413	164.985.453	63,74%
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	469.999.897	316.535.435	153.464.462	67,35%
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	514.999.901	351.850.133	163.149.768	68,32%
5	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	99.999.650	0	99.999.650	0,00%
II	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**762.239.200**	**461.922.560,68**	**300.316.639**	**60,60%**
1	**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**	**364.697.000**	**263.355.810,68**	**101.341.189**	**72,21%**
2	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	122.579.000	83.997.900	38.581.100	68,53%
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	78.810.200	36.581.800	42.228.400	46,42%
4	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	37.874.000	9.879.400	27.994.600	26,08%
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	21.659.000	10.539.250	11.119.750	48,66%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	136.620.000	57.568.400	79.051.600	42,14%
III	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**838.850.000**	**528.632.181**	**310.217.819**	**63,02%**
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	-	-
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	81.050.000	49.699.800	31.350.200	61,32%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	96.300.000	46.922.104	49.377.896	48,72%
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	604.100.000	407.373.777	196.726.223	67,43%
5	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-
6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	22.500.000	8.676.000	13.824.000	38,56%
7	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	-
8	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
9	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah	34.900.000	15.960.500	18.939.500	45,73%
IV	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**432.006.547.586,00**	**419.961.628.133**	**12.044.919.453**	**97,21%**
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	382.296.560.186	386.801.199.133	-4.504.638.947	101,18%
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.017.000.000,00	5.084.553.000	19.932.447.000	20,32%
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	24.692.987.400	28.075.876.000	-3.382.888.600	113,70%
V	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**94.076.000**	**35.195.333,52**	**58.880.666**	**37,41%**
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94.076.000	35.195.333,52	58.880.666	37,41%
C.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.105.000.000**	**1.266.897.219**	**838.102.781**	**60,19%**
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.105.000.000	1.266.897.219	838.102.781	60,19%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Standar Harga	250.000.000	212.439.300	37.560.700	84,98%
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.000.000	32.936.850	17.063.150	65,87%
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000	-	-	-
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	500.000.000	325.466.043	174.533.957	65,09%
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	125.000.000	82.726.800	42.273.200	66,18%
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	575.000.000	275.519.772	299.480.228	47,92%
7	Penilaian Barang Milik Daerah	155.000.000	126.804.703	28.195.297	81,81%
8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	350.000.000	211.003.751	138.996.249	60,29%
	TOTAL ANGGARAN	**445.143.449.925,00**	**430.710.525.653,45**	**14.432.924.272**	**96,76%**

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Tahun 2025 setelah perubahan anggaran

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**8.384.683.236,14**	**7.212.605.625,35**	**1.165.084.611**	**86,10%**
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	59.319.200	51.949.600	7.369.600	87,58%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.290.000	10.589.000	2.701.000	79,68%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.562.000	5.082.000	480.000	91,37%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.639.000	5.873.850	765.150	88,47%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.210.000	4.630.750	579.250	88,88%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.833.200	4.365.000	468.200	90,31%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.000.000	12.970.000	1.030.000	92,64%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.785.000	8.439.000	1.346.000	86,24%
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.303.318.450**	**5.439.805.554**	**863.512.896**	**86,30%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.284.770.000	5.421.810.554	862.959.446	86,27%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.129.000	6.646.000	483.000	93,22%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.419.450	11.349.000	70.450	99,38%
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.891.000**	**9.839.000**	**52.000**	**99,47%**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.891.000	9.839.000	52.000	99,47%
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**205.521.050**	**144.854.901**	**60.666.149**	**70,48%**
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38.143.750	19.615.000	18.528.750	51,42%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	167.377.300	125.239.901	42.137.399	74,82%
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**309.743.648**	**247.256.904**	**62.486.744**	**79,83%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.218.892	10.170.200	48.692	99,52%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.872.400	1.008.300	2.864.100	26,04%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.218.816,14	89.931.224	18.287.592	83,10%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.692.000	9.754.852	7.937.148	55,14%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	2.520.000	1.680.000	60,00%
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.954.240	5.109.458	3.844.782	57,06%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.374.000	84.741.000	25.633.000	76,78%
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.213.300	44.021.870	2.191.430	95,26%
9	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0	0	0	0,00%
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**313.501.538**	**296.440.725**	**17.060.813**	**94,56%**
1	Pengadaan Mebel	27.914.000	27.845.700	68.300	99,76%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285.587.538	268.595.025	16.992.513	94,05%
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**727.487.000**	**628.387.187**	**99.099.813**	**86,38%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.365.000	3.974.000	391.000	91,04%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	197.522.979	42.477.021	82,30%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.122.000	426.890.208	56.231.792	88,36%
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**455.901.350**	**401.064.754**	**54.836.596**	**87,97%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.912.800	115.936.344	22.976.456	83,46%
2	Pemeliharaan Mebel	10.788.500	1.412.500	9.376.000	13,09%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.400.050	71.050.150	22.356.900	77,73%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.800.000	205.672.760	127.240	99,94%
B.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**441.033.634.961,37**	**422.231.732.809**	**18.801.902.152**	**95,74%**
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.438.930.088	1.244.354.601	194.575.487	86,48%
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	345.044.428	285.954.620	59.089.808	82,87%
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	353.393.816	290.014.413	63.379.403	82,07%
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	371.749.200	316.535.435	55.213.765	85,15%
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	368.742.644	351.850.133	16.892.511	95,42%
II	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**529.475.050**	**461.922.560,68**	**67.552.489**	**87,24%**
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	277.851.300	263.355.810,68	14.495.489	94,78%
2	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	88.807.200	83.997.900	4.809.300	94,58%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48.323.900	36.581.800	11.742.100	75,70%
4	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	24.679.000	9.879.400	14.799.600	40,03%
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	14.878.250	10.539.250	4.339.000	70,84%
6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	74.935.400	57.568.400	17.367.000	76,82%
III	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**615.143.300**	**528.632.181**	**86.511.119**	**85,94%**
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-		
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	56.833.400	49.699.800	7.133.600	87,45%
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	66.981.500	46.922.104	20.059.396	70,05%
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	455.993.600	407.373.777	48.619.823	89,34%
5	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-
6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	14.899.800	8.676.000	6.223.800	58,23%
7	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
8	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
9	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah	20.435.000	15.960.500	4.474.500	78,10%
IV	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**438.381.926.273,37**	**419.961.628.133**	**18.420.298.140**	**95,80%**
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	397.010.746.000	386.801.199.133	10.209.546.867	97,43%
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.274.518.673,37	5.084.553.000	8.189.965.673	38,30%
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	28.096.661.600	28.075.876.000	20.785.600	99,93%
V	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**68.160.250**	**35.195.333,52**	**32.964.916**	**51,64%**
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68.160.250	35.195.333,52	32.964.916	51,64%
C.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.448.186.050**	**1.266.897.219**	**181.288.831**	**87,48%**
I	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.448.186.050**	**1.266.897.219**	**181.288.831**	**87,48%**
1	Penyusunan Standar Harga	223.123.000	212.439.300	10.683.700	95,21%
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.202.800	32.936.850	2.265.950	93,56%
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	435.493.000	325.466.043	110.026.957	74,74%
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	88.914.000	82.726.800	6.187.200	93,04%
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	290.117.800	275.519.772	14.598.028	94,97%
7	Penilaian Barang Milik Daerah	130.295.400	126.804.703	3.490.697	97,32%
8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	245.040.050	211.003.751	34.036.299	86,11%
	TOTAL ANGGARAN	**450.866.504.247,51**	**430.710.525.653,45**	**20.155.978.594**	**95,53%**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Nganjuk. Untuk realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk 2025 mencapai 96.76% sesuai dengan dokumen sebelum perubahan dan 95.53 % realisasi anggaran dari setelah perubahan dan menurut kategori capaian kinerja adalah **Tercapai.**

Dan berikut analisis output per subkegiatan tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

   Anggaran Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja perangkat daerah, Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 , Rankir Renja Tahun 2026 , Ranwal Renja 2027, Manajemen resiko 2026 dan perjanjian kinerja 02 Januari 2025 direvisi 23 September 2025

2. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD

   Anggaran sub Kegiatan ini digunakan penyusunan RKA-SKPD TA. 2026.

3. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan penyusunan Perubahan RKA-SKPD TA. 2025.

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan penyusunan DPA-SKPD TA. 2026.

5. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan penyusunan Perubahan DPA-SKPD TA. 2025.

6. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025.

7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan LKjIP, LKPJ dan LPPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

   Anggaran SubKegiatan ini digunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 43 orang dalam 1 tahun anggaran.

2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD

   Anggaran SubKegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan RKBMD dan RKPBMD.

d. Kegiatan Administrasi kepegawaian

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

   Anggaran subKegiatan ini sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Keuangan dan sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk Bimtek Pembinaan Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan RKA-SKPD, Bimtek Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk kantor BPKAD

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan.

3. Penyediaan bahan logistik kantor

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyediaan ATK, bahan pembersih dan makanan minuman harian pegawai selama 12 bulan

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk belanja cetak Stopmap dinas, Amplop dinas dan buku register/agenda surat.

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk pembayaran belanja surat kabar selama 12 bulan dan buku umum lainnya.

6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyediaan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan

7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah selama 12 bulan

8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk pengelolaan dan pendokumentasian arsip.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan dalam kegiatan ini adalah :

1. Pengadaan Mebel

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk pengadaan kursi putar dan podium

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk pengadaan Kunci pintu digital, perangkat akses internet,audio,radio dam selengkapnya, bracket interactive board, Smart TV, Wirelss microphone system,, komputer/PC, laptop, Printer laserjet

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk belanja materai dan buku tera cek.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk pembayaran rekening telepon, listrik dan internet selama 12 bulan.

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyediaan jasa kebersihan gedung kantor selama 12 bulan

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untukmelaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional secara rutin/berkala, penyediaan BBM dan pelumas serta biaya pajak kendaraan bermotor selama 12 bulan
2. Pemeliharaan mebel

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan mebeler kantor.
3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untukpemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dan peralatan gedung kantor.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untukpemeliharaan gedung kantor rutin/berkala, karena gedung masih baru maka belum terdapat banyak pengeluaraan pada sub kegiatan ini.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025
2. Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025
3. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan Perda tentang APBD TA. 2026 beserta lampirannya dan Perbup tentang Penjabaran APBD, SE penyusunan RKA dan Nota Keuangan
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2025 dan lampirannya serta beberapa kali terjadi perubahan yaitu dua kali perubahan Perbup Penjabaran tentang APBD TA.

2025, dan dua kali perubahan Perbup Penjabaran tentang Perubahan APBD TA. 2025.

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pembuatan Laporan Posisi Kas harian, Rekonsiliasi dengan Bank Jatim Cabang Nganjuk, Rekonsiliasi Dana Perimbangan dan PAD dengan Bidang Akuntansi dan BAPPEDA, dan Kegiatan rutin lainnya.

2. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SIPD

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untukverifikasi anggaran kas 52 OPD, penerbitan SPD, dan pengarsipan.

3. Koordinasi fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk monitoring dana transfer masuk ke RKUD melalui rekening koran dan aplikasi OM SPAN, untuk monitoring pelaporan Lembar Konfirmasi Transfer dan Rekapitulasi Konfirmasi Transfer, untuk monitoring penyampaian dana bagi hasil propinsi, dan untuk kegiatan evaluasi lainnya.

4. Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk monitoring pelaksanaan transaksi non tunai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dan untuk evaluasi kegiatan.

5. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas terkait DTH / RTH kabupaten.

6. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perubahan Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBD..

c. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran.
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya dan realisasi anggaran yang disampaikan ke DPRD, Kemendagri dan Kemenkeu.
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan Perda pertanggungjawaban APBD TA. 2024 beserta lampirannya dan penyusunan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD TA. 2024.
4. Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk Koordinasi dengan BPK terkait penyelesaian kerugian daerah dan laporan semester II
5. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk kegiatan Komitmen Bersama Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2025 dan Rakor persiapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD Tahun 2025 sebanyak 52 OPD.

d. Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk verifikasi penyaluran Anggaran Dana Desa dan Dana Desa sebanyak 264 Desa, BKK Infrastruktur, BK Tata Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak

Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyaluran belanja tidak terduga

3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyaluran belanja bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.

e. Kegiatan Pengelolaan Data dan implementasi sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah

   Subkegiatan dalam kegiatan ini adalah :

1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk Pembinaan aplikasi SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subkegiatan-subkegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Penyusunan Standar Harga

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan Konsep (draft) Standar Harga Tahun 2027.

2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan cetak SK RKBMD 52 OPD

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk Rekonsiliasi aset dan FGD terkait tindak lanjut temuan BPK RI dan MCP KPK.

4. Inventarisasi Barang Milik Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk kegiatan inventarisasi BMD dan pemberian sticker barcode kode barang pada 52 OPD

5. Pengamanan Barang Milik Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan kegiatan pensertifikatan Aset Pemda Kab. Nganjuk

6. Penilaian Barang Milik Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan hasil penilaian BMD.

6. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah

   Anggaran subKegiatan ini digunakan untuk melaksanakan penagihan sewa tanah, pembuatan perjanjian surat sewa tanah, penyertifikatan Tanah BMD, dan untuk kegiatan rapat koordinasi dengan pihak terkait.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

BPKAD Kabupaten Nganjuk telah memenuhi target kinerja tahun 2025 baik berdasarkan Renstra 2024-2026 maupun Renstra 2025-2029 dengan pencapaian ≥ 91% sehingga berdasarkan skala kinerja dikategorikan OPD dengan kinerja **TERCAPAI.**

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2024-2026	WTP	WTP	100%
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas audit LKPD oleh BPK	Renstra 2025-2029	WTP	WTP	100%

Dan untuk Realisasi Penyerapan Anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sebesar Rp. **430.710.525.653,45 (96.76%)** sesuai dengan kategori kinerja ≥ 91% yaitu TERCAPAI. Sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan adanya efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor pendukung.

Faktor pendorong pencapaian tersebut adalah

- Laporan keuangan dan aset disusun sesuai dengan regulasi;
- Perencanaan dan Penganggaran disusun secara cermat;
- Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah
- Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan aset Terintegrasi
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Faktor pendukung :

- ❖ Koordinasi dan sinergi dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Nganjuk untuk menyusun laporan keuangan dan laporan barang milik daerah seusai dengan regulasi
- ❖ Memanfaatkan beberapa inovasi seperti SIM-DTH, SIM-ASET dan DITATA TENG DPA

Atas pencapaian ini akan dipertahankan dalam tahun anggaran berikutnya dan terus menerus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu:

a. Melakukan bimbingan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang;
d. Menemukan cara baru / inovasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Nganjuk, 13 Februari 2026

Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

LAMPIRAN LKjIP 2025 (https://bit.ly/LKJIP_BPKAD_NGANJUK2025)

No	Nama Lampiran
1	Perjanjian Kinerja
2	SK IKU
3	Lampiran Bukti Dukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis
4	Lampiran Bukti Dukung Capaian Kinerja Program
5	Bukti Dukung Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan
6	Dokumen Pembanding LKjIP